

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Embrio dari pendidikan inklusif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Undang-Undang dasar 1945 Pasal 31¹. Pada tahun 1997 di Indonesia juga dikeluarkan UU No. 4 Tahun 1997 tentang hak penyandang cacat², dilanjutkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak³, kemudian pada tahun 2003 dikeluarkan UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 mengenai bab II dasar, fungsi dan tujuan pada pasal 3⁴. Kemudian pada bab IV bagian kesatu pasal 5 tentang Hak dan kewajiban Warga Negara⁵.

¹ Ayat (1) “Setiap Warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” UUD 1945.

² Pasal 6 “setiap penyandang cacat berhak memperoleh : ayat (1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan” UU No. Tahun 1997 tentang penyandang Cacat .

³ Pasal 51 “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”

Pasal 52 “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.”

Pasal 53 “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁴ Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis dan bertanggung jawab. UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

⁵ Pasal 5 ayat (1) “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Ayat (2) “Warga Negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus (ABK) dididik bersama-sama anak lainnya (normal) / anak tanpa berkebutuhan khusus (ATBK) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak melalui pendidikan di sekolah terdekat. Sudah barang tentu sekolah terdekat tersebut perlu dipersiapkan segala sesuatunya, seperti dalam semboyan “Bihneka Tunggal Ika” berbeda-beda namun tetap satu. Meskipun dalam pembelajaran inklusif ada percampuran antara anak yang reguler dengan ABK, hal ini adalah upaya untuk mengikis sedikit demi sedikit jurang antara keduanya. Walaupun hal ini berbeda secara substansi dan kemampuan tapi tidak seharusnya dibedakan⁶.

Pendidikan inklusif di Indonesia disahkan oleh pemerintah hingga dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa, ini sangat menarik sekali untuk dikaji, maka tidak heran jika studi tentang pendidikan inklusif banyak dilakukan oleh peneliti, akan tetapi dari sekian banyak studi tersebut lebih mengedepankan tema besar yaitu sekolah inklusif dan manajemen inklusif.

Adapun kajian-kajian di luar tema besar di atas, belum tersentuh dan menjadi terabaikan, padahal ini sangat penting untuk diteliti lebih lanjut yaitu

Ayat (3) “Warga Negara didaerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.”

Ayat (4) “Warga Negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.” UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

⁶ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. *Inclusive Education Profile in Indonesia* . (Jakarta: 2010). 21

pengembangan kurikulum model DMSO (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi dan Omisi) apalagi jika dikaitkan dengan implementasi dalam pembelajaran PAI.

Pengembangan kurikulum model DMSO (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi dan Omisi) merupakan model pengembangan kurikulum KTSP yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan bagi kurikulum di sekolah inklusif⁷. Karena konteks dan subyek di sekolah inklusif yang heterogen maka sangat perlu sekali penyesuaian untuk pengembangan nilai-nilai edukatif dan skillnya. Hal ini sangat menunjang sekali bagi pengembangan peserta didik dalam tiga ranah antara lain *kognitif, afektif* dan *psikomotorik*⁸.

Dalam Kurikulum KTSP bisa dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum antara lain⁹:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
- b. Beragam dan terpadu
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan
- f. Belajar sepanjang hayat
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Prinsip ini sangat menginspirasi adanya kurikulum yang mampu menjawab segala permasalahan dalam pembelajaran inklusif. Berawal dari

⁷ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, *Materi pembelajaran Inklusif SMP bagi Guru Inklusif se-Kota Surabaya* (Surabaya: Dipendik Press, 2011), 67.

⁸ Kognitif adalah pengetahuan, afektif adalah rasa, psikomotorik adalah perilaku / sikap.

⁹ Taufikurrahman Saleh, *Membangun Pendidikan Indonesia Reformasi Pendidikan Menuju Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pers PP IPNU, 2009), 27.

empat komponen utama yang harus terkandung dalam kurikulum yaitu: tujuan, isi/materi, proses dan evaluasi, terdapat pengembangan kurikulum yang mengacu pada empat komponen kurikulum tersebut yaitu pengembangan model kurikulum DMSO (model duplikasi, model modifikasi, model Substitusi dan model omisi)¹⁰.

Dalam pendidikan inklusif ABK dalam kelas reguler kemudian dicampur menjadi satu, dalam implementasinya banyak yang merepotkan guru yang belum siap kompetensinya dan pada akhirnya hasilnya pun kurang maksimal. Kebanyakan guru-guru itu belum siap akan pembelajaran inklusif juga dikarenakan dalam pendidikan konvensional mereka hanya dibekali untuk bagaimana cara mengajar anak reguler saja, tanpa diajari bagaimana mengajar anak ABK. Apa yang kemudian penting digaris-bawahi adalah kian terkikisnya pandangan negatif terhadap integrasi siswa berkebutuhan khusus ke dalam sistem pendidikan umum. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan rancangan kurikulum yang bisa diimplementasikan untuk pendidikan inklusif. Pada satu sisi, kesiapan infrastruktur dan ketersediaan guru mutlak mempertimbangkan keberadaan siswa berkebutuhan khusus. Pada lain sisi, sudah saatnya proses pendidikan mempertimbangan *inner scientific*, sehingga totalitas sistem pendidikan yang berjalan fokus pada potensi individual siswa. Inilah pendidikan inklusif dalam maknanya yang hakiki.

Di Indonesia sekolah inklusif untuk anak yang berkemampuan inferior telah banyak didirikan, salah satunya yakni Sekolah Galuh Handayani yang

¹⁰ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, *Materi pembelajaran Inklusif SMP bagi Guru Inklusif se-Kota Surabaya* (Surabaya: Dipendik Press, 2011), 68.

bertempat di Manyar Sambongan Surabaya. Bertolak dari ciri-ciri anak ABK dan reguler yang berada di sini, kurikulum DMSO digunakan sebagai kurikulum di sekolah tersebut.

Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan sebagai salah satu materi yang bertujuan untuk membentuk pribadi tangguh yang berakhlakul karimah sesuai UU RI No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Pendidikan agama Islam masuk dalam kategori materi yang bisa dikembangkan dalam KTSP, sehingga ini memungkinkan PAI tidak hanya bisa diajarkan dalam konteks pendidikan non inklusif saja namun juga dalam pendidikan inklusif.

Selama ini, masih sangat sedikit sekali Guru Pendidikan Agama Islam yang dibekali pengetahuan tentang tata cara mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mata kuliah mereka, hal ini karena pengajaran Pendidikan Agama Islam belum komprehensif memandang dan mengejawantahkan nilai-nilai keislaman di masyarakat. Kebanyakan para Guru Pendidikan Agama Islam belajar secara otodidak dan belajar secara pengalaman dari lingkungan sekitar yang bersinggungan langsung dengan kehidupan lingkup pembelajaran ABK. Padahal jika dilihat angka pertumbuhan ABK di Indonesia semakin tahun bukan semakin menurun tapi semakin tinggi yang dikarenakan pola life style, hereditas, pengaruh sosial dan lain-lain. Masalah ini apabila dikaitkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, begitu banyak prosentase generasi muda Islam ABK yang membutuhkan uluran tangan penuh kasih sayang, ilmu pengetahuan dan

nilai-nilai keislaman dari guru-guru di Indonesia, yang terkhusus Guru Pendidikan Agama Islam.

“Tak kenal maka tak sayang”, begitulah kiranya sebuah pribahasa yang sangat tinggi maknanya bagi pengejawantahan nilai-nilai keislaman yang dibawa dan di laksanakan oleh Guru Pendidikan Agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus ABK yang sangat beragam kriteria kekhususan dan kemampuannya. Nilai-nilai keislaman akan diterima dan diamalkan ABK jika guru mampu mengajarkan dan mengimplementasikan dalam keseharian mereka semampu yang ABK dapat terima dan dapat dilakukan. Hal ini bagi seorang guru PAI di perlukan kemauan yang kuat, semangat yang tak pernah pudar, keterampilan, kepekaan, kejelian melihat potensi dan hambatan peserta didiknya serta menggunakan kurikulum dan metode yang bisa dengan cepat/perlahan-lahan mampu di terima peserta didiknya baik ABK maupun ATBK, baik disekolah umum, sekolah inklusif maupun SLB (Sekolah Luar Biasa).

B. Identifikasi dan batasan masalah

Pendidikan inklusif merupakan sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak berpartisipasi penuh dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Pendidikan inklusif juga merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama peserta

didik pada umumnya¹¹. Di samping itu, pendidikan inklusif juga melibatkan orang tua dalam cara yang berarti dalam berbagi kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, sedang dalam belajar mengajar, pendekatan guru berpusat pada anak (*student oriented*).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam kajian penelitian tentang pendidikan inklusif ada beberapa pokok yang harus dikaji, diantaranya tentang bagaimana model pendidikan/ sekolah inklusif, bagaimana guru dan peserta didik di sekolah inklusif, sarana dan prasana layanan dan lain-lain. Sedangkan dalam penelitian ini, lebih terfokus pada keinginan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan menggunakan pengembangan kurikulum model DMSO kepada peserta didik di SMP Galuh Handayani (Penyelenggara pendidikan Inklusif).

Pengembangan Kurikulum Model DMSO (duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi) pada SMP Galuh Handayani merupakan kurikulum formal yang telah dilaksanakan, namun di samping kurikulum tersebut di sana juga menggunakan *hidden curriculum*. Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka dalam kajian penelitian Kurikulum DMSO banyak hal yang harus di bahas, di antaranya tentang konsep kurikulum DMSO secara komperhensif, model duplikasi, model modifikasi, model substitusi, model Omisi, prinsip pengembangan kurikulum, penerapan model kurikulum DMSO dan rencana pembelajaran yang didalamnya terdapat pengembangan silabus, pengembangan RPP, strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

¹¹ Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, *Pedoman Manajemen dan pembelajaran Sekolah Inklusiff Tunanetra (A)* (Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional, 2010),2.

Bagaimana hasil yang didapat dari proses pembelajaran itulah maka sangat dibutuhkan penguatan agama serta sikap yang baik dalam sehari-hari, dan ini terdapat pada Pendidikan Agama Islam yang mencakup berbagai macam disiplin keilmuan antara lain (Al-Qur'an-hadits, Fiqih, SKI, Akidah Akhlaq). Dalam mengimplementasikan pembelajaran PAI di sekolah Inklusif membutuhkan kerangka berpikir dan bertindak yang mampu sebagai penjembutan PAI pada peserta didik. Dalam cakupan yang begitu luas maka akan diambil per-KD satu sesuai jenisnya serta bagaimana implementasi pengembangan pembelajarannya jika menggunakan kurikulum model DMSO. Untuk subjek kelas yang akan diteliti adalah kelas inklusif dan kelas sumber (*resource room*) karena dalam dua kategori kelas tersebut terdapat perbedaan pengajaran dengan menggunakan kurikulum yang berbeda.

C. Rumusan masalah

Dari paparan di atas, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengembangan kurikulum model DMSO di SMP Galuh Handayani?
2. Bagaimana implementasi kurikulum DMSO dalam pembelajaran PAI di SMP Galuh Handayani?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui disain kurikulum DMSO di SMP Galuh Handayani (Penyelenggara Pendidikan Inklusif)
2. Mengetahui implementasi kurikulum DMSO dalam pembelajaran PAI di SMP Galuh Handayani (Penyelenggara Pendidikan Inklusif).

E. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu karya akademik yang dapat melengkapi ruang kosong kajian tentang pendidikan inklusif, khususnya perannya dalam merumuskan kebijakan lokal pendidikan dan pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan kurikulum DMSO .
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di tingkat lokal serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pendidik, pengelola lembaga pendidikan, ataupun siapa saja pemerhati peningkatan dan pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI).

F. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa mahasiswa/i yang telah melakukan penelitian yang terkait dalam pendidikan inklusif antara lain :

- a. Tugas Desertasi Zumrotul Mukafa yang menyoroti tentang “ Pendidikan Akhlak Multikultural. (Studi Kasus di Sekolah Dasar Inklusif Galuh Handayani). Dalam desertasi ini subyek yang diteliti berbeda namun sama

dalam satu yayasan yaitu Sekolah Galuh Handayani. Dalam disertasi ini menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam model pendidikan akhlak berbasis multikultural antara lain perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Dalam proses perencanaan juga dijelaskan bahwa dalam sekolah ini mengacu pada kurikulum formal dan hidden kurikulum. Kurikulum formal dirancang dengan empat model, duplikasi, modifikasi, substitusi dan omisi yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang multikultur. Hidden kurikulum diselenggarakan dengan cara melakukan internalisasi nilai-nilai akhlak pada diri peserta didik dengan berbagai macam cara yaitu kegiatan rutin sekolah, kegiatan spontan, melalui keteladanan guru, pimpinan, dan tenaga kependidikan di sekolah.

- b. Tugas Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, M. K. Syarif Hidayatulloh “ pendidikan inklusif dan efektifitasnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di SDN inklusif Klampis-Ngasem I Surabaya”. Penelitian ini menitik beratkan pada pengklasifikasian lima model layanan pembelajaran yaitu: kelas regular (inklusif penuh), kelas pendampingan, kelas remidi, kelas praklasikal dan kelas khusus. Kemudian dalam tesis ini juga menjelaskan adanya modifikasi bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat ABK. Pada penelitian ini juga menjadikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) sebagai salah satu variabel pada tesisnya, dalam variabel ini menunjukkan efektivitas pembelajaran PAI melalui tiga aspek (input, proses, dan output) pada SDN Inklusif Ngasem Surabaya. Namun

penelitian ini belum begitu menjelaskan bagaimana kurikulum yang sudah diterapkan disekolah tersebut.

- c. Tugas Tesis Sri Handikin “Efektifitas Model Pelatihan dengan konsep mentoring untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru yang berkaitan dengan implementasi pendidikan Inklusif di SDN “X” Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana keterkaitan kompetensi Kepala sekolah dan guru setelah diberi model pelatihan dengan konsep mentoring untuk diimplementasikan pada pendidikan Inklusif disekolah tersebut. Penelitian ini menitik beratkan pada subjek central atau stakeholder yang berpengaruh untuk mengawal kurikulum kemudian memberlakukan banyak kebijakan, namun dalam tesis ini belum menjelaskan apa saja dan bagaimana kurikulum yang diberlakukan disekolah tersebut.
- d. Tugas Tesis Istiningsih Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta “Manajemen Pendidikan Inklusif di SDN Klego I Kabupaten Boyolali”. Dalam penelitian ini menganalisis sejauh mana manajemen pendidikan inklusif dan difokuskan pada persiapan serta pelaksanaan pendidikan inklusif.
- e. Tugas Tesis Siti Barokah Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang “Moralitas peserta didik pada pendidikan inklusif (Studi Kasus pada sekolah Inklusif SD Hj.Isriati Semarang). Moralitas Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif, merupakan judul yang dipilih dalam penelitian ini untuk mendukung tersedianya fakta dengan mengungkapkan data dan

penalaran moralitas peserta didik yang dikemas dengan landasan moral budaya Jawa, yaitu prinsip hormat dan prinsip rukun, yang merupakan moralitas yang memberikan dukungan untuk menjaga harmoni kehidupan demi kelangsungan hidup manusia. Gagasan tersebut dilatar belakangi adanya keresahan yang terjadi pada dunia pendidikan tentang moralitas peserta didik yang berada pada degradasi moral, hal tersebut sering disaksikan pada tayangan televisi, mass media dan suguhan-suguhan internet. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa Pendidikan inklusif sebagai solusi dengan memberikan pelayanan pendidikan untuk semua, menerima keberbedaan dan tidak ada diskriminasi. Fokus pada penelitian ini mengajukan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana moralitas peserta didik pada SD Hj. Isriati sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang sekaligus mengkombinasikan kurikulum dengan syariah Islam dan apakah ada perbedaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik non berkebutuhan khusus.

Setelah beberapa penelitian yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti dengan studi kasus yang berbeda dan subjek yang berbeda pula namun dalam term yang sama dimana masih ada keterkaitan dengan pendidikan inklusif, maka posisi penelitian ini lebih pada pengembangan kurikulum KTSP yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yaitu pengembangannya berupa kurikulum DMSO (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi dan omisi). Dalam penelitian ini pula dikaitkan bagaimana implementasi kurikulum DMSO pada

pembelajaran PAI di SMP Galuh Handayani (Penyelenggara Pendidikan Inklusif).

G. Sistematika Pembahasan

Seluruh isi studi akan disajikan dalam lima bab uraian, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: pendahuluan, yang berisi latar belakang yang membicarakan tentang fakta di lapangan serta sesuatu yang seharusnya ada. Nomenklatur akademis ini memunculkan permasalahan ilmiah, tujuan serta kegunaan penelitian. Selain itu, dibahas pula kerangka teoritik sebagai dasar pijakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan obyek penelitian juga dicantumkan untuk menunjukkan posisi teoritik dari penelitian ini dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab kedua ini membahas tentang kajian teoritis pengembangan kurikulum model DMSO (Duplikasi, Modifikasi, Substitusi, Omisi) dalam sekolah inklusif dan implementasinya dalam Pendidikan Agama Islam.

Bab III: Dalam bab ini akan dijabarkan tentang metodologi penelitian akan digambarkan secara spesifik untuk memberikan panduan yang mengarahkan penelitian secara logis dan sistematis. Adapun diantaranya terdiri dari beberapa sub pembahasan yang diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat penelitian, setting sosial penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisa dan teknik keabsahan data.

Bab IV: Bab ini akan menjelaskan hasil-hasil temuan penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, pengembangan kurikulum model DMSO (duplikasi, modifikasi, substitusi, omisi). Peneliti menggunakan teori hanya sebagai alat pembantu untuk membaca realitas (bukan untuk mengecek kevaliditasannya) yang akan mengantarkan peneliti memasuki lokus penelitian. Dalam bab ini juga peneliti memaparkan analisis data dan hasil temuan yang didapat saat penelitian berlangsung.

Bab V: Bagian terakhir ini berisi penutup, kesimpulan dari data-data yang ditemukan di lapangan serta implikasi teoritik. Saran akan memuat rekomendasi yang akan ditujukan kepada lembaga SMP Galuh Handayani, program Pascasarjana, para pemerhati, peneliti pendidikan Islam, dan IAIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya fakultas Tarbiyah yang belum memberikan perhatian khusus tentang pendidikan inklusif, baik penyediaan tenaga pengajar (guru/pendidik) Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum maupun di sekolah inklusif.